LENVARI: Jurnal of Social Science
P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 85-95
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.526

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Saputra Budi Pratama[1*], Firman Firdausi[2], Emei Dwinanarhati Setiamandani[3]
[1,2,3]Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract
This study aims to analyze the implementation of development programs in Bumiaji District, Batu City, and to identify the supporting and inhibiting factors in their implementation. Development programs are government efforts to improve community welfare through infrastructure provision and public service improvement. However, in practice, development implementation often faces obstacles such as limited budgets, delays in budget disbursement, and uneven development distribution. This research used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of development programs in Bumiaji District had generally been carried out well and provided positive impacts on the community. Based on William N. Dunn's evaluation criteria, the development programs have fulfilled aspects of effectiveness, efficiency, responsiveness, and accuracy. However, there are still weaknesses in adequacy and equity because development has not been evenly distributed in all villages. Supporting factors include community participation and budget support, while inhibiting factors include budget limitations, less optimal planning causing budget absorption problems, delays in fund disbursement, uncertain weather conditions, labor recruitment difficulties, and miscommunication between committees and field implementers. Therefore, improvements in planning, coordination, and community empowerment are necessary to optimize and equalize development implementation in Bumiaji District.

Keywords:
Evaluation, Development Program, Government

Article History
Received 01 August 2026
Accepted 24 October 2026

***Corresponding Author:**
saputrabudi13142@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah melalui penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah (Asnah, 2025).

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing (Fajria et al, 2025. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah juga

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 85-95
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.526

memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat (Azka, S. H., 2025).

Kecamatan Bumiaji merupakan salah satu wilayah di Kota Batu yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kecamatan ini memiliki luas wilayah terbesar dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Batu dan memiliki karakteristik geografis berupa daerah pegunungan serta kawasan resapan air yang penting bagi wilayah sekitarnya. Dengan kondisi tersebut, pembangunan di Kecamatan Bumiaji menjadi sangat penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan (Azka & Fidiyani, 2025).Namun demikian, pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Bumiaji masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, keterlambatan pencairan dana, serta belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah desa. Selain itu, kondisi geografis dan cuaca yang tidak menentu juga sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan (Belareq, F. 2026).

Berdasarkan hal itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program pembangunan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan (Cahyo, 2017). Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang meliputi enam indikator evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui indikator tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu secara komprehensif (Fahri, L. N. 2026)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:25), metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta masih ditemukannya beberapa hambatan dalam implementasi program tersebut. Fokus penelitian meliputi evaluasi pelaksanaan program pembangunan berdasarkan indikator evaluasi William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yang terdiri dari pegawai Kecamatan Bumiaji, perangkat desa, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil dan Pembahasan

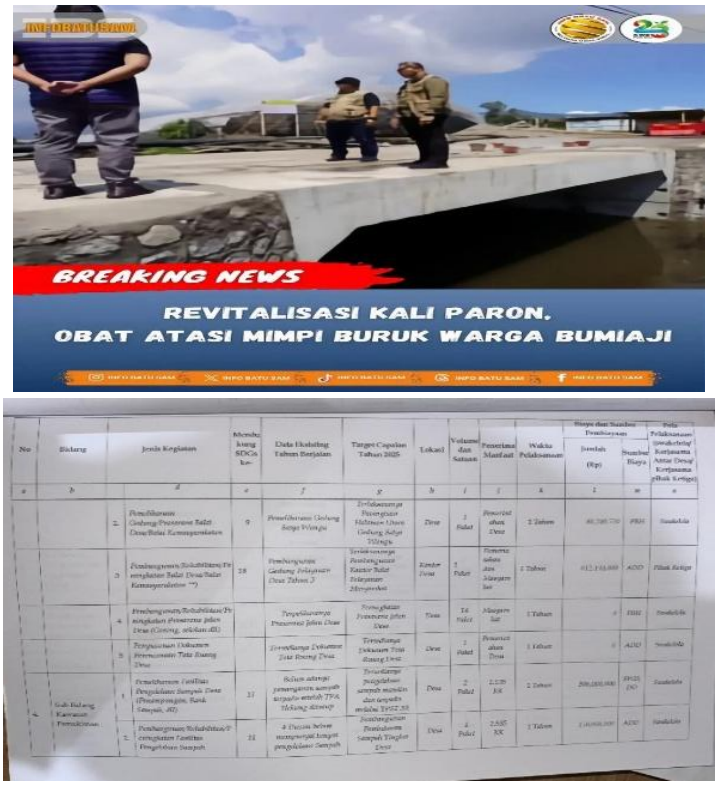
LENVARI: Jurnal of Social Science
P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 85-95
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.526

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program pembangunan secara umum telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang terdiri dari enam indikator evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Dunn,2018)

Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana program pembangunan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Bumiaji telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beberapa pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan desa, saluran drainase, dan fasilitas umum telah membantu meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah cukup membantu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga dinilai telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena sebagian besar program berasal dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang belum selesai tepat waktu akibat kendala teknis dan keterbatasan anggaran.



Gambar 1. Pembangunan Jembatan Kali Paron Dan Pembangunan Atau Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa ,Gorong,Selokan.
Sumber: Data Sekunder, 2026

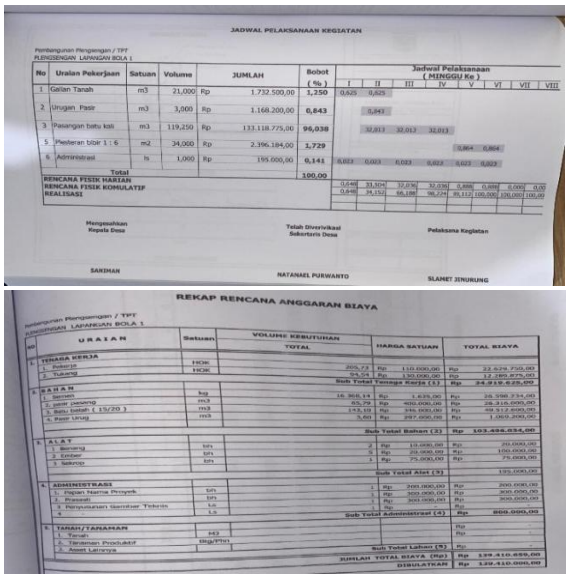
Gambar diatas menunjukan bahwa Pembangunan Desa Bumiaji telah tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan, karena didasarkan

LENVARI: Jurnal of Social Science
P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 85-95
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.526

pada usulan langsung warga yang menentukan skala prioritas secara jelas sehingga program paling mendesak direalisasikan lebih dulu. Keberhasilan ini tercermin pada penyelesaian peninggian jembatan di kali untuk mencegah luapan air sungai dan mengatasi banjir, sebagaimana terekam dalam gambar pembangunan serta laporan RKPDes yang telah dilaksanakan oleh pihak desa, disertai bedah rumah bagi rumah tidak layak huni (lantai tanah, tanpa ventilasi, dinding non-bata) yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, pemeliharaan gedung balai desa dan balai kemasyarakatan, rehabilitasi jalan desa beserta gorong-gorong serta selokan, penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa, serta pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah termasuk penampungan bank sampah, sehingga dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat terwujud secara berkelanjutan.

Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan anggaran pembangunan di Kecamatan Bumiaji telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah kecamatan berupaya memanfaatkan anggaran secara optimal agar program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam penggunaan anggaran, seperti keterlambatan pencairan dana dan rendahnya penyerapan anggaran akibat perencanaan yang kurang matang sehingga menyebabkan terjadinya Silpa. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pelaksanaan beberapa program pembangunan.



JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pembangunan Pengenggan / TPT
PLENGSENGAN LAPANGAN BOLA 1

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume		JUMLAH	Bobot (%)	Jadwal Pelaksanaan (MINGGU Ke) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Galian Tanah	m3	21,000	Rp	1.732.500,00	1,250	0,625	0,625						
2	Urugan Pasir	m3	3,000	Rp	1.168.200,00	0,843			0,843					
3	Pasangan batu kali	m3	119,250	Rp	133.118.775,00	96,038			32,013	32,013	32,013			
5	Plesteran bibir 1 : 6	m2	34,000	Rp	2.396.184,00	1,729						0,864	0,864	
6	Administrasi	ls	1,000	Rp	195.000,00	0,141	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023		
Total						100,00								
RENCANA FISIK HARIAN							0,648	33,304	32,036	32,036	0,886	0,886	0,000	0,00
RENCANA FISIK KOMULATIF							0,648	33,952	65,988	98,024	98,910	99,800	99,800	99,80
REALISASI														

Mengesahkan
Kepala Desa

SAKIMAN

Telah Diverivikasi
Sekertaris Desa

NATANAEL PURWANTO

Pelaksana Kegiatan

SLAMET JENURUNG

REKAP RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pembangunan Plengsengan / TPT
PLENGSENGAN LAPANGAN BOLA 1

NO	URAIAN	Satuan	VOLUME KEBUTUHAN TOTAL	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA
1.	TENAGA KERJA				
	1. Pekerja	HOK	205,73	Rp 110.000,00	Rp 22.629.750,00
	2. Tukang	HOK	94,04	Rp 130.000,00	Rp 12.289.875,00
				Sub Total Tenaga Kerja (1)	Rp 24.919.625,00
2.	BAHAN				
	1. Semen	kg	16.368,14	Rp 1.635,00	Rp 26.598.734,00
	2. pasir pasang	m3	65,79	Rp 400.000,00	Rp 26.315.095,00
	3. Batu belah (15/20)	m3	143,19	Rp 346.000,00	Rp 49.512.690,00
	4. Pasir Urug	m3	5,61	Rp 257.000,00	Rp 1.069.490,00
				Sub Total Bahan (2)	Rp 103.496.034,00
3.	ALAT				
	1. Bor	bh	2	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00
	2. Ember	bh	5	Rp 20.000,00	Rp 100.000,00
	3. Selang	bh	1	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00
				Sub Total Alat (3)	195.000,00
4.	ADMINISTRASI				
	1. Papan Nama Proyek	bh	1	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
	2. Presatil	bh	1	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
	3. Penyusunan Laporan Teknis	ls	1	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
	4	ls		Rp	Rp
				Sub Total Administrasi (4)	Rp 800.000,00
5.	TANAH/TANAMAN				Rp
	1. Tanah	M2			Rp
	2. Tanaman Produktif	Btg/Thn		Sub Total Lahan (5)	Rp
	3. Aset Lainnya			JUMLAH TOTAL BIAYA (Rp)	Rp 129.410.659,00
				DIBULATKAN	Rp 129.410.000,00

Gambar 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Beserta Rekap Rencana Anggaran Dan Biaya Program Pembangunan Kecamatan Bumiaji Kota Batu
Sumber: Data Sekunder RKP Desa Kecamatan Bumiaji Kota Batu 2026

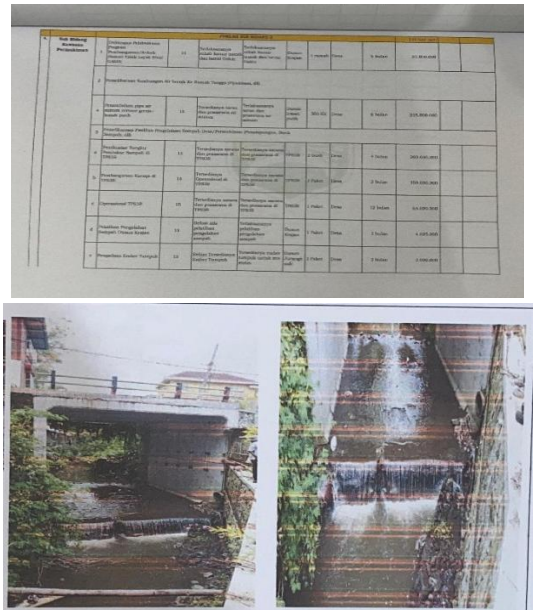
Gambar diatas menunjukan bahwa Pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan bumiaji kota batu menunjukkan telah tercapai secara optimal dari aspek penggunaan anggaran, waktu pelaksanaan, serta kesesuaian antara biaya dan hasil, sebagaimana tercermin dalam Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan beserta Rekap Rencana Anggaran dan Biaya Program Pembangunan Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang bersumber dari RKP Desa. Setiap kegiatan telah dilengkapi jadwal terperinci yang disusun sebelumnya, dengan evaluasi mingguan terhadap capaian persentase *output,* sehingga permasalahan selama pelaksanaan dapat

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 85-95
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.526

diselesaikan segera tanpa mengganggu target waktu. Pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknis yang telah dianalisis sesuai pedoman nasional Kementerian, ditunjang swadaya masyarakat yang mempercepat penyelesaian, misalnya pemasangan batu kali selesai dalam 3-5 hari dibandingkan estimasi standar 10 hari sehingga tingkat penyerapan anggaran tinggi, efisiensi optimal tanpa pemborosan, dan hasil pembangunan benar-benar sepadan dengan usaha serta investasi yang dikeluarkan.

Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana hasil pembangunan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan yang dilakukan pemerintah telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan sarana dan prasarana umum. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih menilai bahwa pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan seluruh wilayah. Hal ini karena masih terdapat beberapa desa yang membutuhkan peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya.



Gambar 3. Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu
Sumber: Data Sekunder, RKP Desa Kecamatan Bumiaji Kota Batu 2026

Gambar diatas menunjukan bahwa Pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan bumiaji kota batu menunjukkan telah tercapai secara optimal data RKP yang dimiliki, tercapainya program pembangunan di Desa Bumiaji menunjukkan kecukupan yang baik pada aspek infrastruktur dasar, dengan dampak langsung seperti pengurangan banjir melalui peninggian jembatan dan pencegahan longsor via pembangunan tanggul. Kecukupan Infrastruktur Fisik Program-program seperti rehabilitasi atau pembangunan rumah tidak layak huni telah meningkatkan kualitas hunian warga, sementara pemeliharaan sambungan air bersih (pipanisasi) dan penanaman pipa air minum memastikan akses air yang lebih andal sehari-hari. Selain itu, fasilitas pengelolaan sampah desa termasuk bank sampah, tungku pembakar sampah, dan pelatihan pengelolaan sampah telah mengurangi masalah lingkungan secara efektif. Dampak Keseluruhan Secara umum, program ini tidak hanya menjawab keluhan masyarakat terkait risiko bencana, tetapi juga mendukung pemberdayaan nonfisik melalui pelatihan, sehingga

LENVARI: Jurnal of Social Science
P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 85-95
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.526

meningkatkan rasa aman dan kemandirian warga Desa Bumiaji.

Pemerataan

Struktur

Pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat pembangunan secara adil kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan di Kecamatan Bumiaji belum sepenuhnya merata. Beberapa wilayah desa memperoleh pembangunan yang lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. Meskipun demikian, pemerintah kecamatan tetap berupaya agar pembangunan dapat dilakukan secara bertahap dan merata.



Gambar 4. Bidang Infrastruktur Aspal Hotmic Beserta Pemasangan Paving Jalan Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu
Sumber: Data Sekunder, RKP Desa Kecamatan Bumiaji Kota Batu 2026

Gambar diatas menunjukan bahwa pelaksanaan program pembangunan di kecamatan bumiaji kota batu telah mencapai keberhasilan, program pembangunan ini berupa infrastruktur aspal hotmix dan pemasangan paving jalan di setiap desa pada Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, telah dirasakan manfaatnya secara bersama oleh seluruh masyarakat. Yang di mana terdapat bahwa distribusi anggaran diberikan secara merata kepada setiap desa sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kesempatan merencanakan dan melaksanakan program disamakan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Akses jalan yang lebih baik ini dimanfaatkan bersama oleh warga yang melintas, sehingga prinsip keadilan dalam alokasi sumber daya tercapai dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan semakin meningkat.

Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kecamatan Bumiaji cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya pelibatan masyarakat

LENVARI: Jurnal of Social Science
P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 85-95
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.526

dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah. Selain itu, pemerintah juga menerima masukan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai cukup baik sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan.



Gambar 5. Proses Musyawarah Desa Dengan Perwakilan Kepala RT, RW Dan Tokoh Masyarakat, Penyampaian Usulan Kegiatan Pembangunan
Sumber: Data Sekunder, RKP Desa Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 2026

Gambar diatas menunjukan bahwa setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan setiap program pembangunan yang dimana melibatkan masyarakat sehinga program tersebut benar-benar di bangun atas apa yang dibutuhkan masyarakat atau permasalahan yang ada di lapangan. Secara responsivitas program pembangunan di Kecamatan Bumiaji tercermin dari proses musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan partisipasi masyarakat secara bertahap mulai dari tingkat RT, RW, dusun, hingga desa. Aspirasi dan kebutuhan riil seperti drainase atau paving jalan dan pembangunan berupa lainya dihimpun, diverifikasi oleh tim RKP, dan diprioritaskan berdasarkan urgensi atau istilah keadaan yang sangat mendesak atau sangat penting sehingga harus segera di perhatikan atau di tindaklanjuti. Dan juga serta keterbatasan anggaran sebelum dimasukkan ke dalam RKP tahunan. Dengan demikian, setiap program pembangunan dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga harapan warga dapat terealisasi secara optimal baik dari anggaran desa maupun usulan ke tingkat kota. Dengan demikian masyarakat merasakan atau mendapatkan keuntungan yang nyata dari setiap program pembangunan yang di bangun di tingkat desa yang dimana telah menyelesaikan setiap permasalahan selama ini.

Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian program pembangunan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar program pembangunan di Kecamatan Bumiaji telah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program pembangunan yang dilaksanakan umumnya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas umum yang mendukung aktivitas masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dinilai cukup tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

LENVARI: Jurnal of Social Science
P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 85-95
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.526



Gambar 6. Pembangunan Infrastruktur Drainase Memperlancar Aliran Air
Sumber: Sekunder RKP Desa Kecamatan Bumiaji Kota Batu 2026

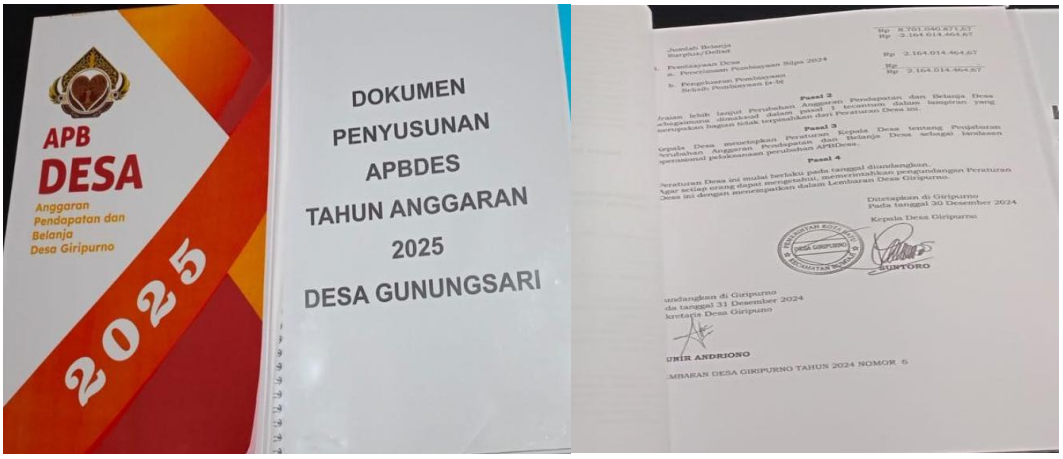
Gambar 6 diatas menunjukan bahwa ketepatan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Bumiaji dinilai tinggi karena relevansinya dengan kebutuhan riil masyarakat, di mana infrastruktur dasar seperti pembuatan drainase memudahkan dan memperlancar aliran air, serta mencegah supaya tanah tidak imbas, dan pembangunan lainya seperti jalan, jembatan, tanggul, plengsengan, dan rest area memberikan dampak signifikan terhadap aksesibilitas, pencegahan banjir, irigasi sawah, serta peningkatan kualitas hidup. Semua program ini menyasar permasalahan utama, dengan manfaat langsung bagi penerima seperti pengunjung wisata dan warga, serta tidak langsung melalui promosi potensi desa, meskipun pemberdayaan nonfisik masih perlu diseimbangkan. seperti, pembangunan infrastruktur drainase memperjelas aliran air sehingga mencegah banjir, melindungi lahan pertanian, dan memperkuat stabilitas jalan serta tebing, sebagaimana tercermin dalam realisasi anggaran dan swadaya masyarakat yang efisien.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan unsur yang berperan dalam memperlancar serta meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya, dukungan lingkungan, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, faktor pendukung mencakup aspek pendanaan, kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program (Asian Development Bank, 2017).

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Bumiaji meliputi ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD, Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan secara relatif lancar dan tepat waktu. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan hingga pelaksanaan swakelola turut memperkuat keberhasilan program, karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga terlibat langsung dalam pembangunan. Di sisi lain, strategi pemerintah desa dalam menetapkan prioritas kebutuhan serta mengusulkan program ke tingkat kota juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi meskipun terdapat keterbatasan anggaran desa.

LENVARI: Jurnal of Social Science
P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 85-95
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.526



Gambar 7. Penyusunan APBD dan DD
Kecamatan Bumiaji Kota Batu
Sumber: Data Sekunder, APB Desa DAN DD Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 2026

Gambar diatas menunjukan bahwasannya Faktor utama paling mendukung kelancaran program di kecamatan bumiaji kota batu berasal dari sumber anggaran yang andal, anggaran pembangunan di kecamatan bumiaji kota batu bersumber dari APBD kota, daerah, dan pusat, termasuk Dana Desa (DD) yang disesuaikan dengan RPJMDes selama 8 tahun. Ketersediaan DD dan APBD yang tepat waktu menjadi pondasi kuat, karena pencairan dana dari pusat berjalan lancar tanpa masalah birokrasi biaya. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat sepanjang siklus program sangat krusial: mulai dari penyampaian masukan pada musyawarah dusun dan desa sebagai dasar perencanaan, hingga partisipasi langsung dalam pelaksanaan swakelola. Masyarakat menyediakan tenaga kerja dan material untuk pembangunan fisik, seperti infrastruktur dasar. Pendekatan ini memastikan program sesuai rencana, meningkatkan rasa memiliki masyarakat, serta optimalisasi penyerapan anggaran.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan berbagai kendala yang dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan kebijakan secara optimal (Dye, 2017). Hambatan implementasi kebijakan dapat bersumber dari keterbatasan sumber daya, lemahnya perencanaan, serta faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, identifikasi faktor penghambat menjadi penting untuk mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan program serta sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Ditemukan bahwa faktor penghambat pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Bumiaji cukup beragam dan saling berkaitan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama karena jumlah kebutuhan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang tersedia, sehingga pemerintah desa harus melakukan prioritas program dan tidak semua usulan dapat direalisasikan. Selain itu, perencanaan yang kurang matang menyebabkan terjadinya Silpa sehinga rendahnya penyerapan anggaran, ditambah dengan hambatan lain seperti keterlambatan pencairan dana di awal tahun, kondisi cuaca yang tidak menentu, kesulitan dalam merekrut tenaga kerja tepat waktu, proses pengadaan material yang memerlukan waktu, serta miskomunikasi antara panitia dan pelaksana di lapangan yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 85-95
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.526

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul didukung oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses pengelolaannya (Santoso, 2016). Dukungan tersebut tidak hanya berasal dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari kerja sama antar aktor, keselarasan tujuan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Salah satu faktor utama adalah sinergi antar pemangku kepentingan melalui penerapan konsep pentahelix yang melibatkan pemerintah desa, BUMDes, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media. Keterlibatan berbagai pihak ini memberikan kontribusi dalam bentuk promosi, pembinaan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Kolaborasi lintas sektor tersebut berperan dalam membantu mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi desa.

Selain itu, keselarasan visi dan misi antara pemerintah desa, BUMDes, serta unsur kelembagaan desa lainnya turut mendukung konsistensi dalam pengelolaan desa wisata. Kesamaan arah kebijakan ini mempermudah proses pengambilan keputusan dan menjaga keberlanjutan program yang dijalankan. Peran aktif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan di lapangan. Pokdarwis terlibat dalam pengelolaan unit usaha wisata, pelayanan kepada pengunjung, kegiatan promosi, serta penyelenggaraan wisata edukasi. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diimplementasikan melalui kegiatan nyata. Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul. Masyarakat terlibat langsung dalam berbagai aktivitas wisata, seperti pemanfaatan sektor pertanian, peternakan, dan kehidupan sosial sebagai daya tarik wisata edukasi.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat dalam pengembangan desa wisata. Secara keseluruhan, faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul meliputi sinergi antar pemangku kepentingan, keselarasan visi dan misi, peran aktif Pokdarwis, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi lokal. Faktor-faktor tersebut berkontribusi dalam mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dari lapangan, dapat disimpulkan. Peneliti menilai bahwa Efektivitas program pembangunan di Kecamatan Bumiaji tergolong baik karena sebagian besar kegiatan telah mencapai tujuan yang diharapkan keberhasilan ini ditunjukkan oleh adanya dampak nyata seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Efisiensi program pembangunan di Kecamatan Bumiaji telah tercapai dengan baik karena adanya keseimbangan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Kecukupan program pembangunan di Kecamatan Bumiaji tergolong cukup baik, terutama d alam mengatasi permasalahan fisik yang bersifat mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Aspek pemerataan dalam program pembangunan di Kecamatan Bumiaji telah berjalan dengan baik dan mencerminkan prinsip keadilan. Responsivitas program pembangunan di Kecamatan Bumiaji tergolong baik karena telah mampu menyesuaikan program dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketepatan program pembangunan di Kecamatan Bumiaji tergolong baik karena telah mampu menjawab kebutuhan utama masyarakat dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan unsur yang

berperan dalam memperlancar serta meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya, dukungan lingkungan, serta partisipasi masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan suatu kendala yang dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan kebijakan secara optimal, hambatan implementasi kebijakan tersebut bersumber dari keterbatasan anggaran, perencanaan yang kurang matang menyebabkan Silpa, keterlambatan pencairan dana di awal tahun, kondisi cuaca yang tidak menentu, kesulitan dalam merekrut tenaga kerja tepat waktu, dan miskomunikasi antara panitia dan petukang..

Daftar Pustaka

Asian Development Bank. (2017). *Impact evaluation of development interventions: A practical guide*. Manila: Asian Development Bank. https://doi.org/10.22617/TCS179188-2

Asnah, A., Edo, F., & Rofiatin, U. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Raharjo dalam pengembangan desa wisata berbasis pertanian. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 12*(2), 294–302. https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.4060

Azka, S. H., & Fidiyani, R. (2025). Pelaksanaan tata kelola pemukiman bagi kelestarian lingkungan atas pendirian ekowisata di Kota Batu. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 4*(2), 211–232. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2880

Belareq, F. (2017). Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Ilmu Pemerintahan, 5*(2), 701–710.

Cahyo, D. N. (2017). Evaluasi pelaksanaan program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur sumber daya air di bidang irigasi kecil. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 13*(2), 175–188. https://doi.org/10.14710/pwk.v13i2.15831

Cakrawijaya, M. A., Riyanto, B., & Nuroji. (2014). Evaluasi program pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. *Journal of Regional and City Planning, 25*(2), 137–156. https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.25.2.4

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York, NY: Routledge.

Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Boston, MA: Pearson.

Fahri, L. N. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11*(1), 75–88. https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/109

Fajria, R., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Evaluasi implementasi desentralisasi di Indonesia: Keberhasilan dan kegagalan. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies, 4*(2), 142–149. https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.259

Grindle, M. S. (Ed.). (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system: A handbook for development practitioners*. Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5823-5

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik, kimia kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nurdiansyah, A. (2018). Urban slum upgrading policy in Jakarta (Case study: Kampung Deret program implementation). *The Indonesian Journal of Planning and Development, 3*(1), 19–31. https://doi.org/10.14710/ijpd.3.1.19-31

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2008). *OECD framework for the evaluation of SME and entrepreneurship policies and programmes*. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264040090-en

World Bank. (2004). *World development report 2004: Making services work for poor people*. Washington, DC: World Bank and Oxford University Press. https://doi.org/10.1596/0-8213-5468-X